

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori yang akan mendasari dari penelitian ini. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian ini mencakup teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, upah minimum regional (UMR) dan teori pertumbuhan ekonomi.

2.1 Konsep Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kekayaan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.

Pembangunan bangsa membutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme* (1990) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitik beratkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013).

Pembentukan modal manusia merupakan suatu tahapan untuk mendapatkan dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memiliki keahlian, pendidikan, spesialisasi dan pengalaman yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya pembentukan modal manusia dikaitkan dengan investasi pada manusia yang diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang produktif dan kreatif. IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan) (UNDP, 2011). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, IPM tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksetaraan

dan sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.

2.1.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Masing-masing dimensi IPM ini, direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli.

2.1.2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indikator indeks pembangunan manusia menurut BPS, (2018) adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Indeks harapan hidup

dihitung dengan menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

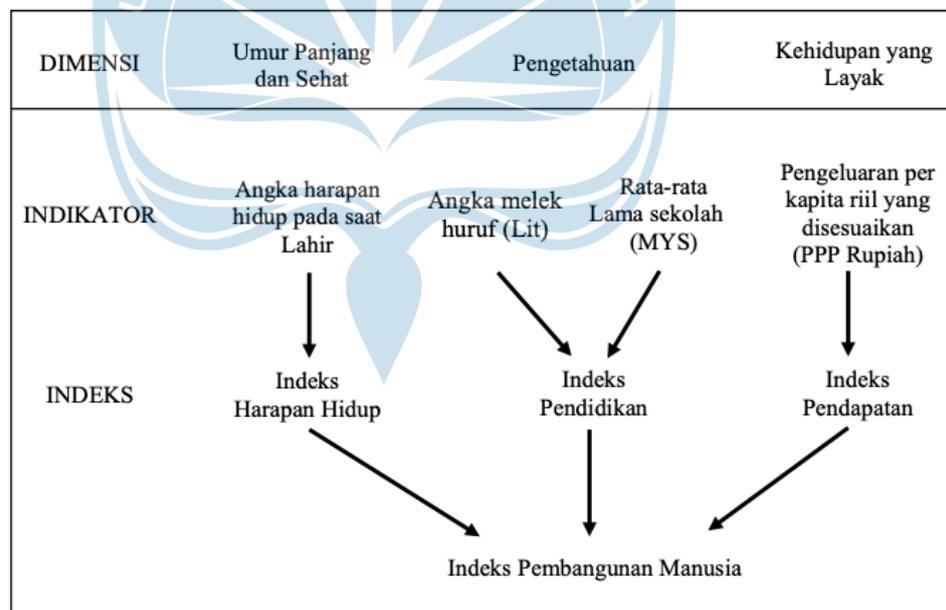
2. Tingkat Pendidikan

Indikator yang digunakan dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling – MYS*) dan angka melek huruf. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 (seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

3. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk, sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Perhitungan

IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita, karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*). Pada gambar 2.1 berikut ini ditunjukkan diagram komponen IPM.



Sumber: BPS, 2010

Gambar 2.1 Diagram Komponen IPM

2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro & Smith, 2006). Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output dalam jangka panjang dan bagaimana interaksi antarfaktor tersebut sehingga terjadi pertumbuhan (Boediono, 1982). Karakteristik pertumbuhan ekonomi salah satunya tercermin dengan tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya peningkatan PDRB maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita.

Tingginya pertumbuhan output per kapita akan mengubah bentuk pola konsumsi yang berdampak pada tingginya tingkat daya beli masyarakat. Sedangkan menurut Adisasmita, (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Sukirno (2002) berpendapat bahwa secara umum pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur tersedia lebih melimpah, jumlah perusahaan meningkat dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, serta perkembangan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi

perkembangan ini diharapkan akan menambah peluang kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan seperti yang diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Rostow dan Teori Harrod-Domar

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDRB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan *capital stock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas SDM dan infrastruktur pendukung (Todaro & Smith, 2006).

2. Teori Ekonomi Klasik

Adam Smith mengemukakan suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercermin pada pertumbuhan output yang dihasilkan. Dengan demikian, suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai dengan dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Menurut

teori ekonomi klasik unsur pokok dari sistem produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia (jumlah dan kualitas penduduk), dan stok modal. Menurut teori ini, sumber daya alam yang tersedia adalah batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian.

Teori Pertumbuhan Klasik David Ricardo mengembangkan Teori Klasik Smith ke dalam model yang lebih tajam baik dalam konsep-konsep maupun dalam hal mekanisme proses pertumbuhan. Menurut Ricardo proses pertumbuhan ekonomi adalah proses tarik menarik antara kedua kekuatan dinamis ini, yang akhirnya dimenangkan oleh *the law of diminishing return* sehingga, menurut teori ini, keterbatasan tanah akan membatasi pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1982).

David Ricardo menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan alam (Yuliani, 2019). Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun yang hanya dapat digunakan untuk biaya tingkat hidup minimum sehingga perekonomian berada pada taraf subsisten (*subsistence level*). Ketika sudah mencapai taraf ini, perekonomian tidak akan berkembang atau yang lebih dikenal *stationary state* (Ahman & Indriani, 2006).

3. Teori Ekonomi Neo-Klasik

Solow sebagai perintis pertumbuhan neo-klasik, mengemukakan perkembangan ekonomi dihasilkan dari pembentukan harga, produksi

dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu (Suryana, 2000) :

- a. Faktor penting dalam perkembangan ekonomi adalah dengan adanya akumulasi kapital. Tingginya tingkat tabungan ditentukan oleh tingginya pendapatan dan bunga. Pada suatu tingkat tertentu, besarnya bunga juga dapat menentukan tingginya investasi.
- b. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat tumbuh bersama.
- c. Adanya aspek internasional dalam setiap perkembangan. Semakin luas pemasaran maka memungkinkan produksi yang besar, sehingga produktivitas semakin meningkat.
- d. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus menerus (gradual).
- e. Aliran neo-klasik merasa optimis dalam perkembangan ekonomi. Aliran sebelumnya mengatakan bahwa sumber daya alam menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan aliran ini meyakini bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan sumber daya alam.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu proses pemerintah daerah bersama masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan juga

merangsang pertumbuhan (Arsyad, 2010). Dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional, unsur regional atau wilayah sudah pasti termasuk dalam analisisnya. Wilayah yang di maksud dapat berupa provinsi, kabupaten atau kota. Target pencapaian ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu saja berbeda, hal ini dikarenakan potensi ekonomi di wilayah berbeda-beda sehingga kebijakan pemerintah untuk mengaturnya pun berbeda di sesuaikan dengan potensi setiap wilayah. Dalam konteks regional, kesejahteraan masyarakat tersebut di ukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Pertumbuhan ekonomi mikro secara agregat, untuk suatu wilayah ditunjukkan oleh tingkat capaian produk domestik regional bruto (PDRB) atau *gross regional domestic product* (GRDP). PDRB adalah agregat nilai tambah dari semua barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor menurut lapangan usaha di suatu negara baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku (Widodo, 1990). Untuk menghitung PDRB di suatu daerah, BPS menggunakan tiga pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Kuncoro, 2013)

PDRB dapat dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku yang disebut juga PDRB nominal, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan, atau disebut PDRB riil, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai harga dasar. PDRB harga berlaku menunjukkan pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB harga konstan dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Kuncoro, 2013).

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan itu adalah ketidakmampuan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Kuncoro, 2013). Pengukuran untuk menentukan standar hidup dinegara dihitung dari beberapa indikator, antara lain *Gross Domestic Product* atau GDP per kapita, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Masalah kemiskinan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan *safety life* hingga mempertaruhkan tenaga fisik untuk mendapatkan keuntungan (Prawoto, 2005). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang akibatnya memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah atau *inter-region income gap* (Harahap, 2006).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Standar hidup yang masih rendah dari masalah hidup dapat berhubungan dengan total pendapatan sedikit, kurangnya tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan yang kurang memadai, pendidikan yang tidak tinggi serta kurangnya lapangan pekerjaan menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih rendah.

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan atau biasa disebut *poverty line* (Todaro & Stephen, 2006). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau \$2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

2.3.2 Teori Kemiskinan

Kemiskinan memiliki dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.

1) Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan meruakkan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Dan tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.

2) Teori Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat yang menyatakan kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. (Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998). Kemiskinan berkaitan dengan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan.

2.3.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut yaitu kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Negara berkembang memiliki tiga ciri utama yang menjadi penyebab sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman (Jhingan, 2012).

Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.

3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata
4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

2.4 Konsep Upah

2.4.1 Pengertian Upah

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam (Normalisasi, 2012), upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Sumarsono (2003) mengemukakan UMR bertujuan menjamin penghasilan pekerja serta meningkatkan produktivitas pekerja

dengan mengembangkan dan meningkatkan produksi yang lebih efisien. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang –undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang di peroleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sadono Sukino dalam Normalitasari, 2012). Dari definisi–definisi diatas dapat disimpulkan bahwa upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah di berikan oleh tenaga kerja kepada sebuah perusahaan. Oleh karena itu dalam pemberian upah, perusahaan perlu memperhatikan prinsip adil dan layak.

2.4.1.1 Teori Upah Menurut Karl Marx

Teori Upah Menurut Karl Marx Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat di bedakan menurut dua yaitu, (1) Menurut Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) Berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas (Sony Sumarsono dalam Normalitasari, 2012). Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan dinegara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara–

negara kapitalis. Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaan menurut Karl Mark dibagi menjadi tiga (Normalitasari,2012):

- a. Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang jumlahnya hampir sama, pada nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah setiap orang kira-kira sama.
 - b. Sistem pengupahan memberikan intensif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
 - c. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar-benar mau bekerja menurut kemampuannya.
4. Teori Upah Menurut Pertambahan Produk Marginal

Teori ini menyatakan dalam rangka memaksimalkan keuntungan, pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap faktor produksi yang dipergunakan untuk menerima diberikan imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Sedangkan dalam teori Neo Klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha.

Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang yang diberikan oleh tenaga kerja, artinya pada teori

ini dapat diketahui bahwa teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktorproduksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawanya. Teori Neo Klasik menganggap bahwa upah cukup fleksibel di pasar tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja dan tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran. Artinya pada tingkat upah rill semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut, maka akan memperoleh pekerjaan. Karena pada dasarnya mereka yang menganggur, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka ini adalah penganggur yang sukarela.

2.4.2 Macam-Macam Upah

Terdapat 3 macam upah yang masing masing memiliki makna yang berbeda sebagai berikut:

- 1) Upah nominal atau upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi (Sadono Sukirno, 2002).
- 2) Upah rill adalah upah yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja tersebut (Sadono Sukirno, 2002). Kecenderungan yang selalu berlaku adalah keadaan dimana harga barang dan jasa maupun upah terus menerus mengalami

kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tidak pada tingkat yang sama besarnya. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh tenaga kerja.

- 3) Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sektoral. Dalam hal ini upah minimum merupakan upah pokok terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali bekerja. Pada upah minimum terdapat unsur yang paling penting yakni, jumlah upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga (Sonny Sumarsono dalam Normalitasar , 2012).

2.4.3 Tujuan Penetapan Upah

Tujuan penetapan upah minimum menurut (Payaman J. Simanjutak, 1998) adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungan.
- 2) Untuk menghindari dan mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus sehingga mereka bersedia menerima upah dibawah tingkat kelayakan.
- 3) Sebagai jaring pengaman untuk menjaga tingkat upah agar tidak menurun.

- 4) Mengurangi tingkat kemiskinan absolut pekerja, terutama bila upah minimum tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja serta keluarganya.
- 5) Mendorong peningkatan produktivitas melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya manajemen untuk memperoleh kompensasi atas peningkatan upah minimum.
- 6) Meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.
- 7) Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis.

2.4.4 Jenis – Jenis Upah Minimum

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhanhidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa jenis Upah minimum sebagai berikut:

- 1) Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sector tertentu dalam daerah tertentu;
- 2) Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sector tertentu dalam daerah tertentu;
- 3) Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umum

nya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

2.5 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.5.1 Hubungan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori ekonomi klasik menjelaskan salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi tercemin dengan tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya peningkatan PDRB maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita. Tingginya pertumbuhan output per kapita akan mengubah bentuk pola konsumsi yang berdampak pada tingginya tingkat daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dimana daya beli masyarakat sendiri merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.

Peningkatan PDRB yang diiringin dengan meningkatnya IPM di tandai dengan adanya peningkatan pada angka PDRB yang diiringi dengan peningkatan pada angka IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini didukung pula oleh penelitian menurut Elistia & Syahzuni, (2018) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap IPM.

Sejalan degan temuan sebelumnya Deb, (2015) juga menunjukkan bahwa GDP per kapita secara statistik dapat menjadi indikator kemajuan HDI.

2.5.2 Hubungan UMR terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Permasalahan tenaga kerja terkait dengan UMR telah menjadi indikasi pertama dalam mengatasinya. Hal ini dikarenakan berkaitan langsung dengan arah pertumbuhan manusia pada masing masing daerah. (Sumarsono, 2003) mengemukakan UMR bertujuan menjamin penghasilan pekerja serta meningkatkan produktivitas pekerja dengan mengembangkan dan meningkatkan produksi yang lebih efisien.

Peningkatan yang terjadi pada penghasilan perindividu akan menyebabkan meningkatnya standat kelayakan hidup masyarakat dan daya beli akan meningkat, sehingga peningkatan ini akan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Megantara et al., (2020) di mana UMR memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

2.5.3 Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Masalah kemiskinan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan *safety life* hingga mempertaruhkan tenaga fisik unuk mendapatkan keuntungan (Prawoto, 2005). Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (Todaro & Stephen, 2006). Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat

kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dapat memberikan efek negatif terhadap IPM. Hal ini didukung oleh penelitian Muliza et al., (2017) yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM.

2.6 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Deb, (2015) adalah menganalisis kesenjangan antara GDP dan *Human Development Index*, untuk mengetahui apakah pengalaman negara dengan pendapatan tinggi berbeda dari yang berpendapatan rendah. Metode yang digunakan pada penelitian adalah *Logit and Probit Analysis*. Penelitian Deb, (2015) ini menunjukkan bahwa GDP per kapita secara statistik dapat menjadi indikator kemajuan *HDI*, analisis untuk kelompok negara berpenghasilan berbeda menunjukkan bahwa hubungan positif lebih tinggi untuk negara berpenghasilan rendah dibanding dengan negara berpenghasilan menengah dan tinggi di sepanjang tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Maqin & Sidharta, (2017) adalah menganalisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia dan Konsumsi Listrik di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode analisis deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan PDB dengan pembangunan manusia dan konsumsi listrik. Penelitian Maqin & Sidharta, (2017) ini menunjukkan bahwa Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara PDB dengan pembangunan manusia dan konsumsi listrik di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti & Fevriera, (2020) adalah menganalisis Pengaruh Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap IPM di Jawa Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian adalah data panel. Penelitian Cahyanti & Fevriera, (2020) ini menunjukkan bahwa upah minimum regional dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dan kota cenderung memiliki konstanta yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten.

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta & Mitra, (2004) adalah menganalisis kemungkinan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kesehatan, menggunakan data panel untuk negara bagian India. Metode yang digunakan pada penelitian adalah data panel. Penelitian Gupta & Mitra, (2004) ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi memungkinkan pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik. Pengeluaran kesehatan merupakan penentu penting untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dan status kesehatan yang lebih baik, dan oleh karena itu merupakan alat utama yang tersedia bagi pembuat kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widodo et al., 2020) adalah menganalisis pengaruh tiga faktor yaitu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia di lima provinsi terpilih di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian adalah data panel. Penelitian (Widodo et al., 2020) ini

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan membawa pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan upah minimum positif dan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirza, (2015) adalah mengetahui pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap IPM Jawa Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian adalah data panel. Penelitian Mirza, (2015) ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Utama et al., (2015) adalah mengetahui pengaruh PDRB, belanja modal, dan kemiskinan terhadap IPM Jawa Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian adalah data panel dan analisis lintas. Penelitian Utama et al., (2015) ini menunjukkan bahwa Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak ada yang berada pada level lower dan terus mengalami peningkatan pada periode tersebut. Pengaruh pendapatan sektoral dan belanja modal secara regresi berpengaruh secara signifikan sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

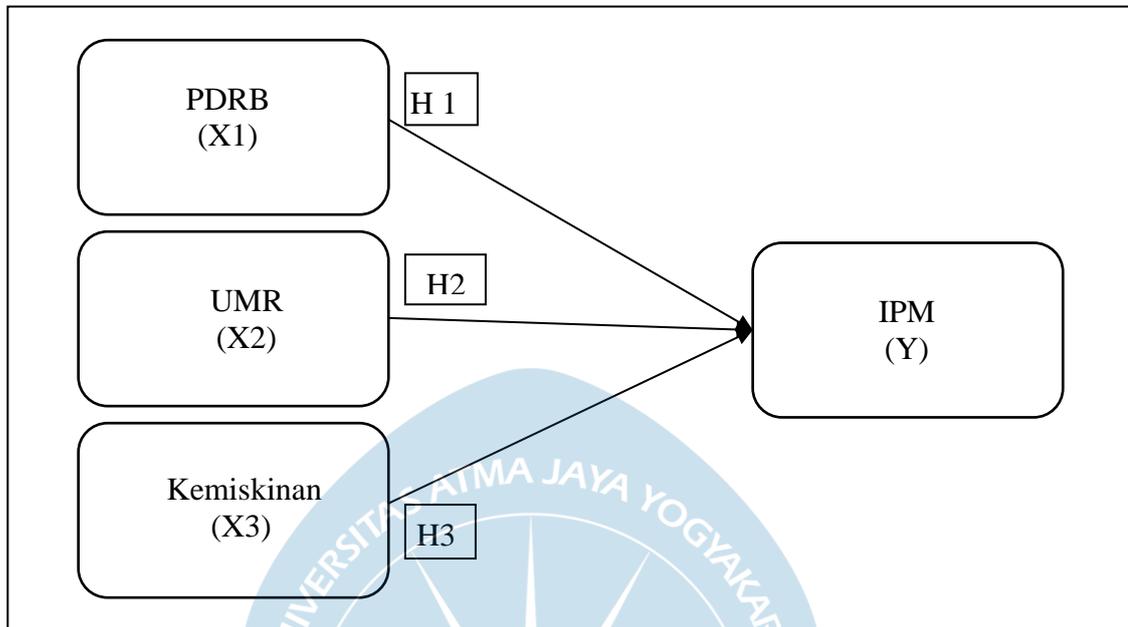
Penelitian yang dilakukan oleh Megantara et al., (2020) adalah menganalisis pengaruh angka melek huruf dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di

Provinsi Bali. Metode yang digunakan pada penelitian adalah Analisis jalur (path analysis). Penelitian Megantara et al., (2020) ini menunjukkan bahwa angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin, (2015) adalah menganalisis dampak inflasi, PDRB dan perkembangan upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia masyarakat di provinsi aceh. Metode yang digunakan pada penelitian adalah model regresi lineir berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Penelitian Zainuddin, (2015) ini menunjukkan bahwa cara parsial atau individu variabel inflasi, produk domestic regional bruto, dan perkembangan upah minimum regional berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Aceh.

2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka penulis membuat konsep kerangka pikir yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini dalam penelitian ini dalam gambar 2.2 sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, manusia bertindak sebagai pelaku serta modal dalam suatu pembangunan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu modal yang dapat disejajarkan dengan modal fisik atau sumber daya alam dalam menciptakan suatu output. Oleh karena itu, tinggi rendahnya IPM setiap daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan manusia yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan tingginya PDRB per kapita maka tingkat standar kelayakan hidup masyarakat dan daya beli akan meningkat, sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat berdasarkan upah minimum regional tiap kota/kabupaten yang didapat. Peningkatan yang terjadi pada penghasilan perindividu akan menyebabkan meningkatnya standar kelayakan hidup masyarakat dan daya beli akan meningkat, sehingga peningkatan ini akan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Indikator lain yang mempengaruhi IPM yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin dapat memberikan efek terhadap IPM.